

Efektivitas *Reversal Burden of Proof* Menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Islam)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

HASRULAH JAYA SAPUTRA
NIM. 10200114094

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasrullah Jaya Saputra
Nim : 10200114094
Tempat/Tgl.Lahir : Mangkutana, 01 Juli 1995
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Biola Raya No.154, Perumnas Antang. Blok 10.
Judul : Efektivitas Reversal Burden Of Proof Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau di buat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum

Samata 16 Juni 2019

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S A R

HASRULLAH JAYA SAPUTRA

NIM: 10200114094

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt tuhan semesta alam yang telah mencurahkan nikmat, karuni, rahmat dan petunjuk yang tak terhingga kepada penulis. Atas nikmat, karunia dan rahmat dan petunjuk itulah penulisan di berikan kesabaran, keuletan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Efektivitas *Reversal Burden Of Proof* (Pembalikan Beban Pembuktian) Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”** dengan tepat waktu.

Solawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari masa kebodohan sampai masa kecanggihan dan ilmu pengetahuan saat ini. Semoga rahmat dan inayah Allah swt selalu tercurahkan kepada beliau, keluarga sahabat dan ummatnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada sosok yang selalu ada buat penulis, sosok yang selalu mendoakan dan mensupport penulis, saat penulis berada di titik terbawah. Sosok itu ialah kedua orang tua penulis. Yang telah melahirkan , mendidik, membiayai, membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih untuk kasih dan sayangnya kepada penulis dan mungkin penulis tidak akan perna bisa membalas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis kepada seluruh keluarga, sahabat, rekan-rekan yang telah memberikan motivasi, saran dan kritik yang membangun sehingga penulis akhirnya sampai kepada akhir perjuangan untuk

meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, MSi, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Abd. Halim Talli M.Ag., selaku wakil dekan I, bapak Dr. Hamsir, S.H.,M.H., selaku wakil dekan II, bapak Dr. Saleh Ridwan M.Ag selaku wakil dekan III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan Dr Kurniati, M.Hi. selaku sekertaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr Dudung Abdullah, M.Ag, selaku pembimbing I dan bapak Abd Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D. dosen pembimbing II, bapak Dr. Hamsir, S.H., M, Hum. sebagai penguji I dan bapak Dr. Hamzah, M.H.I. sebagai penguji II
5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff akademik fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar atas bantuan yang di berikan selama penulis kuliah di kampus UIN Alauddin Makassar ini.

6. Seluruh teman-teman angkatan 2014 fakultas Syariah dan Hukum terkhusus teman-teman HPK B 2014 yang telah menjadi kawan seperjuangan Selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini.
7. Adik-adik ku yang tergabung dalam delegasi tingkat Nasional dan Tingkat jurusan pada lembaga IPPS terimakasih atas segala motivasi kalian selama saya mengerjakan skripsi.
8. Seluruh senior-senior, teman-teman, serta adik-adik lembaga Ikatan Pegiat Peradilan Semu (IPPS) yang telah mengajarkan, memotivasi, membuat pengalaman baru, keluarga baru bagi penulis. Banyak hal yang penulis dapatkan selama berlembaga di IPPS ini yang penulis tidak dapatkan di bangku kuliah. dan teman-teman delegasi dalam ajang kompetisi di Univ. Trisakti, Univ. Islam Indonesia, Universitas Syiah Kuala Aceh dan Univ. Hasanuddin.
9. Para Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.

Dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan penulis sangat menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis sangat harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan karya ini, agar lebih bermanfaat untuk ke depannya.

Makassar, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	20
A. Tinjauan Tentang Teori dan Sistem Pembuktian.....	20
B. Tinjauan Tentang Teori Pembalikan Beban Pembuktian....	39
C. Tinjauan Tentang Teori Tindak Pidana Korupsi.....	44
D. Tinjauan Tentang Teori Hukum Pidana Islam.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Sumber Data.....	54
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Instrumen Penelitian.....	55
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN Efektivitas Reversal Burden of Proof Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Mekanisme Penerapan Reversal Burden Of Proof.....	59

	C. Kelebihan Dan Kekurangan Reversal Burden Of Proof.....	70
	D. Efektifitas Reversal Burden Of Proof Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	73
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B.Implikasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79



ABSTRAK

Nama : Hasrullah Jaya Saputra
Nim : 10200114094
Prodi/Jur : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Judul : Efektivitas *Reversal Burden of Proof* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Skripsi ini berjudul Efektivitas *Reversal burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Hukum pidana islam. Dengan sub masalah yakni sebagai berikut : 1) Bagaimanakah mekanisme penerapan *Reversal Burden of Proof* (pembalikan beban pembuktian) Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?. 2) Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan *Reversal Burden of Proof* yang diterapkan pada perkara korupsi ? 3) Bagaimanakah efektivitas *Reversal Burden of Proof* (pembalikan beban pembuktian) dalam perspektif hukum pidana Islam

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder dan . Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan *Reversal Burden of Proof* tidak begitu efektif karena asas yang berlaku pada sistem pembalikan beban pembuktian adalah Asas *Presumption of Guilt* (asas praduga bersalah) yang artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Asas ini dianggap sebagaian orang sebagai hal yang merugikan hak-hak terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan asas *lex specialist derogat legi generallie*, yang dengan sendirinya menyimpang dari KUHAP serta kelebihan *Reversal Burden of Proof* dalam persidangan memberikan sedikit kemudahan jaksa dalam hal membuktikan asal usul kekayaan terdakwa, cukuplah terdakwa sendiri yang membuktikannya dan kekurangan *Reversal Burden of Proof* pada perkara korupsi masi tergolong sangat kurang karena di anggap merugikan hak-hak dari terdakwa. Sementara dalam hukum pidana Islam *Reversal Burden of Proof* dinilai tidak efektif karena lingkup berlakunya hukum pidana Islam hanya untuk negeri muslim.

Implikasi penelitian ini diharapkan agar dapat dengan mudah dilakukan penelusuran terhadap aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana. Apalagi tindak pidana korupsi tergolong dalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang sangat merugikan banyak orang, sehingga dibutuhkan penanganan yang berbeda dalam pemberantasannya. Meskipun sistem *reversal burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) dinilai merugikan Hak-hak bagi terdakwa, tetapi dalam penerapannya, pemberlakuan asas ini justru telah memperhitungkan kesulitan dalam pembuktian, namun tetap dalam koridor tidak melanggar HAM (hak asasi manusia) dan konstitusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam Masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

Jika kita melihat tentang hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan mengkaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya maka dapat dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Lebih lanjut, menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur segala kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formal ("*Formeel Strafrecht*" / "*Strafprocesrecht*").¹

Dalam UUD 1995 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machstaat*).Ini

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 73-75.

berarti bahwa republic Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Dikaji dari perspektif sejarahnya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebutkan bahwa hukum pidana yang bersifat hukum publik seperti dikenal sekarang ini telah melalui suatu perkembangan yang panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.³

Konsekuensi logis dimensi perkembangan hukum pidana sebagaimana konteks di atas, ada sifat privat dari hukum pidana. Seiring berjalannya waktu dan masyarakat hukum yang relatif lebih maju maka hukum pidana kemudian mengarah, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari hukum publik seperti dikenal sekarang ini. Secara gradual, hukum pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan pertimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang di lain pihak.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 1.

³E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTM, 1996), h. 38.

Selanjutnya, ketentuan hukum pidana sesuai konteks di atas dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*).

Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus menurut W.P.J. Pompe, H.J.A. Nolte, Sudarto dan E.Y. Kanter diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijkfeiten*).⁴

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi dan pencucian uang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Kedua bentuk kejahatan ini telah menjadi salah satu permasalahan bagi bangsa yang belum terselesaikan. Kejahatan ini termasuk kejahatan kerah putih dan kejahatan luar biasa yang penyebabnya pun sangat kompleks, sehingga upaya penanganannya tidaklah mudah.

Di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini juga

⁴E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), h. 22.

menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius pemberantasan korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya. Padahal, kesulitan itu di sebabkan oleh korupsi.

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pernah dijuluki ‘undang-undang sapu jagat’ karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping itu, ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara(KPKPN). Kemudian, dengan

adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu pasal 10 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Begitu pula pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di lain pihak, sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan operasional pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan cenderung meningkat. Korupsi tambah merajalela, kendati terlalu banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur Korupsi.

Di berlakukannya Undang-Undang Korupsi dimaksudkan yang menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi. Hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.⁵

⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 3-4

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada UU khusus hukum Pidana, disamping memuat hukum pidana materiel juga memuat hukum pidana formil. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus, ialah hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Sedangkan diluar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana dalam KUHAP, kodifikasi hukum pidana formil. Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, di lakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya, dalam hukum pidana formil Korupsi di atur hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam *kodifikasi* (KUHAP).⁶ Pembuktian korupsi tetap memperhatikan Pasal 183 kecuali dalam hal pembuktian terbalik (Pasal 37 ayat 2). Dalam system terbalik, ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti di gunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa, jadi kebalikannya. System pembuktian dalam pasal 183 adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana, kecuali di tentukan lain dalam hukum mpembuktian khusus. Sebagaimana di ketahui, bahwa hukum pebuktian khusus. Sebagaimana di ketahui, bahwa hukum pembuktian di bentuk untuk satu-satunya tujuan adalah menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar vonis. Pasal 183 adalah menentukan

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*(Bandung:Penerbit P.T Alumni,2008), h 5

syarat mutlak yang harus di penuhi untuk menetapkan (kesimpulan) tentang keyakinan terbuktinya kesalahan terdakwa yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan tindak pidana. Seluruh kegiatan pembuktian akan dan pasti berujung pengujiannya pada ketentuan pasal ini. Perbedaan dengan system beban pembuktian, antara lain juga mengenai bahan yang boleh di gunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (pasal 26A).

Ketentuan Khusus mengenai pembuktian dalam perkara Korupsi terdapat dalam:

1. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b;
2. Pasal 37;
3. Pasal 37A;
4. Pasal 38B;

Apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas di cermati, maka dapat di simpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem. *Pertama system terbalik*, *kedua system biasa* (sepeerti KUHP, kewajiban pada JPU dengan prinsip: negative berdasarkan UU yang terbatas), dan *ketiga semi terbalik* atau bisa juga di sebut sistm **berimbang terbalik**.

System terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima *gratifikasi* (pasal 12B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa di anggap bersalah. Jadi. System terbalik ini adalah ke balikan dari atas *presumption of innocence*.

System terbalik hanya berlaku pada: *pertama*, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), dan *kedua*, terhadap harta benda yang belum di dakwakan tetapi di duga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

System semi terbalik atau berimbang terbalik maksudnya beban pembuktian di letakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

System biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. System ini di gunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang diletakkan pada syarat nilai Rp 10 juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 juta pada korupsi suap menerima *gratifikasi*, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana . korupsi suap menerima *gratifikasi* ini dapat di sebut juga dengan system pembebanan pembuktian *berimbang bersyarat*. Di sebut berimbang, karena beban pembuktian itu di berikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Di sebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal berimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah di letakkan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima *gratifikasi* yang di peroleh pegawai negeri si pembuat. Apabila lebih atau kurang dari nilai Rp 10 juta.

System pembebanan pembuktiaan terbalik dalam hokum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hokum pembuktian perkara korupsi dari Negara anglo saxon. Seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. System pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap.

Bagaimana gambaran system beban pembuktian terbalik dalam hokum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca norma pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya adalah

- 1) Pasal 37 merupakan dasar hokum system pembebanan pembuktian terbalik
- 2) Pasal 12B ayat 1 huruf a dan pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya menggunakan system terbalik.⁷

Adanya beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa, cenderung mengalihkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innoncence*) menjadi praduga bersalah (*presumption of guilty*), yang pada dasarnya beban untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka ataupun terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2008), h 113-114

Secara keseluruhan, beberapa kekurangan yang juga terdapat di dalam metode pembalikan beban pembuktian antara lain:

Pertama: bahwa dalam metode pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya menjamin bahwa seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan upaya korupsi dapat membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan. Bila ini yang terjadi, boleh jadi hakim dapat dengan leluasa menghukum terdakwa bersalah karena persoalan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya.

Kedua: bahwa penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi jika tidak dilakukan dengan tepat dapat berakibat terhadap kurangnya implementasi hukum dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pembalikan beban pembuktian bisa saja mengabaikan hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk dilindungi nama baiknya.

Ketiga: dalam praktik sehari-hari, metode *Reversal Burden of Proof* (Pembalikan Beban Pembuktian) di Indonesia masih tergolong baru. Apalagi belum banyak perkara yang diputus di pengadilan yang menggunakan metode pembuktian terbalik terutama perkara-perkara korupsi. Hal ini tentunya menyulitkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan pembalikan beban pembuktian terutama untuk perkara tindak pidana korupsi.

Keempat: belum adanya ketentuan hukum terutama hukum acara yang mengatur secara khusus tentang penggunaan pembalikan beban pembuktian yang

dapat dijadikan acuan para penegak hukum sehingga metode ini sukar untuk di implementasikan.

Kelima: secara teoritis, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian memberi kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam menuduh seseorang meskipun belum tentu orang tersebut melakukan mengenai sesuatu hal apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, telah terabaikannya asas *presumption of innoncence* (praduga tak bersalah), sehingga dapat merugikan kedudukan serta hak terdakwa dalam proses pemeriksaannya, karena bisa saja terjadi kesalahan dalam menuduh seseorang. dan pelanggaran terhadap kepentingan hukum setiap orang yang dituduh sangat mungkin terjadi.

Diterapkannya metode pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*) diharapkan mampu mewujudkan nilai keadilan sosial dalam penegakan hukum, sehingga orang yang bersalah dapat dihukum, harta dan aset milik Negara dapat kembali, sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang hukum itu sendiri dalam rangka melakukan upaya hukum pembalikan beban pembuktian untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam perkara ini membahas tentang efektifitas *Reversal Burden Of Proof* (Pembalikan Beban Pembuktian), dan bagaimanakah kelebihan dan kekurangan *Reversal Burden Of Proof* (Pembalikan Beban Pembuktian) di dalam tindak pidana korupsi? Serta mekanisme penerapan *Reversal Burden Of Proof*

(Pembalikan Beban Pembuktian) dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di dalam system hukum yang berlaku di Indonesia. Kegunaannya secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu hukum yang membahas tentang Metode Pembalikan Beban Pembuktian (*reversal burden of proof*) di dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Deskripsi Fokus

Adapun istilah yang digunakan yaitu

- a) *Reversal Burden of Proof* : Atau pembalikan beban pembuktian yang artinya bahwa tersangka/terdakwa berperan aktif dalam hal pembuktian. Adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak sehingga beban pembuktian tersebut tidak lagi diletakkan pada diri penuntut umum, tetapi kepada terdakwa.⁸
- b) Tindak pidana korupsi terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

⁸Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.219.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, pokok masalah yang ingin penulis ketahui adalah bagaimanakah bagaimanakah efektifitas Reversal burden of proof (pembalikan beban pembuktian) dalam Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ? sehingga penulis mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan *reversal burden of proof* menurut Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan *reversal burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) yang di terapkan pada perkara korupsi ?
3. Bagaimana efektifitas *reversal burden of proof* dalam perspektif hukum pidana Islam ?

D. Tinjauan Pustaka

Dengan memerhatikan tema yang di angkat, maka sumber data yang di butuhkan berkenaan dengan buku-buku atau literature yang berhubungan dengan hukum pidana islam dan hukum pidana Nasional yang berada di Indonesia.

⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta ; Penerbit Pt Alumni, 2015), h.79.

1. Martiman Prodjohamidjojo, dalam bukunya yang berjudul *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*, buku ini menjelaskan tentang delik korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi telah juga melanggar hak-hak sosial dan masyarakat secara luas, maka pemberantasan delik korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Buku ini juga menjelaskan tentang penanganan delik korupsi harus secara khusus, antara lain dengan pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Penulis juga berupaya untuk mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰
2. Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian tindak Pidana Korupsi*, buku ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pembuktian Terbalik sekaligus menentukan system beban pembuktiannya, system beban pembuktian setidaknya mengatur tentang siapa yang di bebani membuktikan setidaknya mengatur tentang siapa yang di bebani membuktikan dari suatu objek tertentu dengan alat-alat bukti tertentu dan dengan cara-cara yang bagaimana membuktikannya serta menentukan pula standar bukti yang harus di gunakan dalam hal menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya objek apa yang di buktikan,

¹⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No 20 Tahun 2001)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 98.

hukum pembuktian tindak pidana korupsi adalah hukum pembuktian perkara pidana yang berlaku umum dalam kodifikasi (KUHP), kecuali Hal-hal tertentu yang di atur secara khusus, seperti system beban pembuktian, objek-objek pembuktian dari system – system pembuktian tersebut ¹¹

3. Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi*, buku ini menjelaskan tentang tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat meyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideology Negara, perekonomian , keuangan Negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit di tanggulasi, buku ini jga membahas bahwa pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, maka dari itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat di golongan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Buku ini juga menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melaksanakan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹²

¹¹Adami Chazawi ,*Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*,(Bandung:PT Alumni, 2006), h.9

¹²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 69 -70.

4. Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normative, Teoritis, Praktis Dan Masalahnya)*, Buku ini menjelaskan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa, penanggulangannya harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan buku ini juga membahas pembuktian terbalik yang terdapat dalam hukum positif Indonesia (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001), Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 dan Praktik Peradilan perkara korupsi. Esensial dan asasii yang dapat dilakukan upaya hukum banding dalam ketentuan pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2000.¹³
5. Yenti Garnasih menulis buku yang berjudul *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* dalam buku ini memaparkan ihwal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pembahasannya dimulai dengan memaparkan pengertian dan proses kejahatan pencucian uang. Kemudian membahas perihal penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan permasalah penerapannya, penyidikan, penuntutan, dan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pembahasan

¹³Lilik Muladi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia :Normative, Teoritis, Praktis Dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2015), h.38.

selanjutnya yaitu membahas tentang ihwal penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi dan kejahatan narkoba, serta kejahatan perbankan dan pencucian uang. Pada bagaian akhir buku ini dibahas tentang penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dalam persepektif tindak pidana umum dan khusus.

6. Menurut pendapat Andi hamzah, dalam buku Yunus Husein yang berjudul *Bunga rampai anti pencucian uang* ada tiga (3) mekanisme p encucian uang yang dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha real estate dan perusahaan lainnya, yakni: Penempatan (*placement*), Pelapisan (*layering*) , dan Penggabungan (*integration*).
7. Menurut pendapat Maria Silvy E. Wangga di dalam jurnal hukum yang berjudul *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)* menyebutkan bahwa fenomena tindak pidana pencuciaan uang dilakukan secara sistematis, rapi dan sulit diungkapkan dengan melibatkan pemangku kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif terus meningkat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) bahwa sepanjang tahun 2007-2011 terdapat 2.258 transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) kepada terdakwa terhadap harta kekayaan yang terkait dengan perkara

bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan dan mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan baik sebelum, selama dan setelah menjabat.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah agar setiap orang ataupun mahasiswa hukum yang ingin mengetahui lebih luas dan lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya konsep pembalikan beban pembuktian (*Reversal Burden of Proof*) itu, dapat mempelajari dan melihat beberapa gambaran materi yang telah dikaji secara mendalam agar dapat menjadi ilmu pengetahuan yang berguna dan diamalkan ajarannya. Adapun tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui mekanisme penerapan *reversal burden of proof* menurut Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b. Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan *reversal burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) yang di terapkan pada perkara korupsi
- c. Untuk mengetahui efektifitas *reversal burden of proof* dalam perspektif hukum pidana Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Penelitian secara Teoretis :

Diharapkan dapat menjadi salah satu teropong untuk mengetahui materi tentang penggunaan pembalikan beban pembuktian (*Reversal Burden of Proof*) di dalam tindak pidana korupsi mengingat masih kurangnya pengetahuan umum tentang pembahasan tersebut.

- b. Kegunaan Penelitian secara Praktis :

Diharapkan dapat memberikan informasi secara menyeluruh mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem pembalikan beban pembuktian, sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Tentang Teori dan Sistem Pembuktian

1. Pengertian Sistem

Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., Sistem adalah pemikiran bulat yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling mengisi dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Serta kebulatan pemikiran ini merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Menurut Kamus Hukum (*Dictionary of Law*), Sistem adalah Tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normative.¹⁵ Sedangkan Menurut Penulis bahwa Sistem adalah Bagian-bagian yang saling berhubungan di dalam satu kesatuan dimana bagian-bagian tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

2. Pengertian Pembuktian

Kata Dasar dari Pembuktian adalah Bukti, Bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Dalam kamus hukum yang ditulis oleh Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo bukti adalah sesuatu yang

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.16; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 36.

¹⁵M.Marwan & Jimmi P, *Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 569.

digunakan untuk menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa (Hukum Pidana).¹⁶ Jadi Pembuktian adalah suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan untuk memberikan bukti. Selanjutnya kita akan memberikan penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata Hukum, Pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang Bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum di dalam Proses Peradilan. Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si terdakwa.¹⁷

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., menjelaskan bahwa pembuktian dapat didefinisikan sebagai usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁸

Adapun menurut Darwan Prints bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁹

¹⁶Dzulrifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* [t.d.] h. 82

¹⁷M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 274.

¹⁸J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 135.

¹⁹Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), h. 106

3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Di Indonesia

Bila diperhatikan hukum pembuktian kita, system pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan perihal pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistim pembuktian terutama tentang (jenis) alat bukti-alat bukti yang boleh digunakan untuk membuktikan; cara bagaimana alat bukti itu boleh digunakan, dan nilai kekuatan dari alat bukti-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran guna menarik kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang di butuhkan.²⁰

Apabila dilihat dari isinya maka Hukum dibedakan menjadi dua, yakni Hukum Materil dan Hukum Formil. Hukum Materil merupakan Hukum yang mengatur isi dari pada hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan-hubungan hukum dalam bidang perdata diatur oleh hukum perdata sedangkan hubungan-hubungan hukum bidang publik diatur oleh hukum publik seperti hukum pidana, dsb. Sedangkan Hukum Formil adalah Hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mempertahankan dan menegakkan hukum materil. Hukum formil biasa juga disebut dengan hukum acara. Dalam hukum pidana ada juga disebut dengan Hukum Pidana Materil dan hukum Pidana Formil. Hukum Pidana Materil adalah Keseluruhan Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan kepada siapa dapat dijatuhkan

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Malang : Media Nusa Creative, 2018), h.21

pidana serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukan tindak pidana tersebut.

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana. Atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Di Kejaksaan dan Di Pengadilan. Jika kita merujuk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana Undang-undang tersebut merupakan hukum positif di Indonesia yang berlaku sejak disahkan pada tahun 1981 sampai dengan adanya perubahan dan/atau penggantian dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan eksekutif dan legislatif.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (*materielle warheid*) atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki. Dengan demikian dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya kebenaran formal (*formeele warheid*) yang didasarkan semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum, akan tetapi ternyata usaha mencari kebenaran materil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh

kebanyakan orang.²¹ Mengapa sampai dikatakan demikian, prakteknya memang cukup rumit untuk menemukan kebenaran materil karena hal ini sangat bergantung pada berbagai aspek dan dimensi. Seperti dimensi waktu, dimana suatu peristiwa pada masa lampau atau beberapa bulan yang lalu tidak mungkin dapat diingat seratus persen pada saat sekarang. Makin lama waktu lampau itu maka makin sulit buat para hakim untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa-peristiwa tersebut oleh karena manusia tidak mampu untuk mengembalikan waktu lampau tersebut.

Hukum acara pidana menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati. Agar supaya hakim bisa mendapatkan keyakinan oleh karena itu hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi peristiwa-peristiwa yang sudah lampau itu. Dengan pandangan demikian dapatlah disebutkan secara jelas bahwasanya jika hakim telah menetapkan perihal adanya suatu kebenaran maka aspek ini merupakan pembuktian tentang suatu hal. Dan lebih lanjut lagi bahwa pembuktian melalui hukum pembuktian meliputi beberapa dimensi, seperti :

- a) Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau.
- b) Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan.
- c) Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Selanjutnya dalam rangka menerapkan pembuktian, hakim lalu bertolak pada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan

²¹Memed Riadi, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 44.

suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadili. Maka berdasarkan sistem pembuktian pada umumnya dikenal ada tiga teori sistem pembuktian, Yakni :

- a) Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theori*)
- b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intivie*)
- c) Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*).²²

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia maka kita harus memberikan penjelasan satu persatu bagaimana sistem pembuktian pada umumnya.

- a) Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theori*)

Berdasarkan teori ini, Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam Undang-undang. Dengan kata lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan Undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.²³ Konkretnya, Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus

²²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 249.

²³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, Edisi II (Cet. III; Jakarata: Sinar Grafika, 2011), h. 27.

mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini hakim terikat pada pepatah kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. begitupun sebaliknya jika tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.²⁴

Penerapan sistem pembuktian *Conviction intime* mempunyai bias subjektif, yaitu sistem pembuktian *conviction intime* menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah. Dalam sistem ini keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan dan bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat

²⁴Leden Marpaung, *Peroses Penaganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, h. 26.

bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem pembuktian *conviction intime* ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian *conviction intime* sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim, sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Keyakinan hakimlah yang paling penting, dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonce* pada dasarnya identik dengan sistem *conviction intime*, lebih lanjut pada sistem pembuktian *conviction raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi

dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Keberatan terhadap teori pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime*) adalah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan karena badan pengawas tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.²⁵

c) Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari Aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonance*).²⁶

²⁵Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h.234

²⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 249.

Dengan peramuan ini maka substansi sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijz. Theorie*) tentulah melekat adanya anasir-anasir sebagai berikut yaitu :

- 1) Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Undang-undang dan
- 2) Terhadap alat-alat bukti tersebut, hakim yakin baik secara materil maupun secara prosedural.

Selanjutnya perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan Hakim melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistem pembuktian pada umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theori*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.²⁷

²⁷Leden Marpaung, *Peroses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, h.

4. Pengertian Bukti, Barang Bukti, dan Alat Bukti

a. Bukti

KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Hukum, bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa (H.Pidana).²⁸ Bukti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *evidence*. Di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain: *Indication of Something or Establishes The Truth*. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”.²⁹ Tindakan penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Dengan perkataan lain bahwa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Ahli/Laporan Ahli;
- 4) Surat dan Barang bukti yang disita, kesemuanya mempunyai nilai sebagai bukti.

b. Barang Bukti

Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak

²⁸M.Marwan & Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of law* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 113.

²⁹Leden Marpaung, *Peroses Penaganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, h. 22-23

pidana yang terjadi. Sedangkan dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan bahwa “barang-barang yang dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
- 2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
- 3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana;
- 4) Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tidak bernyawa adalah sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya, barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya demikian pula barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk menganiaya atau pembunuhan orang dan sebagainya, sedangkan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya.³⁰

c. Alat Bukti

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja.

³⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, h.266

KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, bukti adalah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa.³¹

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti yang disebutkan oleh Pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, mereka tidak boleh mempergunakan alat bukti diluar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian, hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang disebutkan di dalam pasal Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.³²

Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.³³

³¹Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 147

³²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* Edisi II (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 285

³³R. Soenarto, Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)* (Cet. XV; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.437

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ialah sebagai berikut:³⁴

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa

Selanjutnya akan diuraikan alat-alat bukti diatas baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti diatas maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembukian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

1) Keterangan Saksi.

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.³⁵

Syarat Sah Keterangan Saksi :

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, ia lihat sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*Testimonium de Auditu* = terangan yang

³⁴R. Soenarto, Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, h.438

³⁵Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, h.239

diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).

- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP).³⁶
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- e) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan Undang-undang.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi :

- (1) Diterima sebagai alat bukti sah
- (2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- (3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
- (4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2) Keterangan Ahli

Di dalam KUHP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut :

- a) Menurut pasal 1 angka 28 KUHP, bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

³⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h. 286

pemeriksaan”.

- b) Menurut pasal 186 KUHP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.³⁷

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan
- c) Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.³⁸

3) Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.³⁹

Demikian pula menurut pasal 187 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dalam surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

³⁷Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, h. 245

³⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h. 304-305

³⁹Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberti, 1982), h.

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴⁰

Ada 2 bentuk surat :

1. Surat *Authentik*/ Surat Resmi
 - a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
2. Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan
 - Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspur, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.

Nilai Kekuatan Pembuktian Surat

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas

⁴⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, h. 264

2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
3. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.⁴¹

Dalam Acara Perdata, akta Autentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta autentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya.

4) Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah :

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karna persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun denga tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
 - (1) Keterangan saksi;
 - (2) Surat;
 - (3) Keterangan terdakwa
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan trtentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁴²

⁴¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Penijauan Kembali*, h. 317

⁴²Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, h. 265

Petunjuk yang bisa bernilai sebagai alat bukti petunjuk adalah perbuatan, atau kejadian ataupun keadaan yang bersesuaian satu sama lain ataupun bersesuaian dengan tindak pidana itu, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Perbuatan, kejadian atau keadaan selain ada persesuaian antara satu dengan yang lain baru merupakan alat bukti petunjuk apa bila diperoleh dari alat bukti sah yang telah ada terlebih dahulu.

Oleh sebab itu petunjuk sebagai alat bukti tidak diperoleh ditingkat penyidikan dan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, akan tetapi melalui suatu proses disidang pengadilan yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa atau alat bukti surat.⁴³

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri. Dalam hal terdakwa menyangkal disidang, maka keterangannya dalam BAP dipenyidikan dapat menjadi alat bukti petunjuk asalkan keterangan didalam BAP tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 22 K/Kr 1953 pengakuan terdakwa diluar sidang yang ditarik tanpa alasan adalah merupakan suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa tersebut. Oleh sebab

⁴³Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, h. 154-155

itu suatu kekeliruan yang nyata apabila BAP tersangka dijadikan sebagai alat bukti surat. Dalam hal terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan akan tetapi pengakuannya itu tidak didukung alat bukti sah yang lain maka pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

B. Tinjauan Teori tentang *Reversal Burden Of Proof* (Pembalikan Beban Pembuktian).

Tidak hanya sistem pembuktian saja yang berbeda, beban pembuktian pun berbeda-beda yang bergantung kepada sistem pembuktian tersebut. Selain berdasarkan sistem pembuktian, beban pembuktian yang digunakan juga dapat ditentukan dari jenis tindak pidananya. Beban pembuktian dalam perspektif hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu beban pembuktian umum/konvensional, beban pembuktian terbalik dan beban pembuktian berimbang.

Secara umum, dalam sistem peradilan di Indonesia, beban pembuktian yang dianut adalah beban pembuktian umum/konvensional dimana beban pembuktian ada di tangan Penuntut Umum, bukan pada terdakwa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini dikatakan merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Namun ada beberapa kategori

tindak pidana yang mensyaratkan adanya Pembalikan Beban Pembuktian, seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Perlu kita ketahui dan sepakati bersama sebelumnya, bahwa istilah yang benar bukanlah Pembuktian Terbalik, walaupun istilah ini yang lebih populer di kalangan masyarakat, tetapi istilah yang lebih tepatnya adalah Pembalikan Beban Pembuktian. Hal ini sebagaimana dijelaskan Akil Mochtar dalam bukunya yang berjudul Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Menurut Akil dengan mengutip pendapat Andi Hamzah, istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Di dalam buku tersebut lebih lanjut ditulis bahwa Istilah ini (pembuktian terbalik, ed.) sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijslast* atau *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”.⁴⁴

Istilah Pembalikan Beban Pembuktian, mengisyaratkan bahwa tersangka/terdakwa bersifat aktif dalam hal pembuktian, tidak lagi bersifat pasif sebagaimana yang berlaku dalam beban pembuktian pada umumnya dimana pihak Jaksa Penuntut Umumlah yang berperan aktif dalam pembuktian. Sehingga di sisi lain menyiratkan adanya kekhususan dari beban pembuktian terhadap tindak pidana-tindak pidana yang telah ditentukan.

⁴⁴Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 39.

Mengenai beban pembuktian, dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa. Karena pencucian uang fokus pada penelusuran aliran dana hasil korupsi (Kejahatan lain), maka upaya pemblokiran dana atau penyitaan harus disegerakan untuk keperluan tujuan akhir yaitu perampasan tentu selain itu juga memenjarakan pelaku. Untuk kepentingan penelusuran, penyitaan, dan perampasan maka muncul pemikiran untuk dilakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa. Jika mereka bisa membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita, dibekukan tersebut bukan berasal dari kejahatan dan yang bersangkutan bisa menjelaskan asal usulnya maka berarti harta tersebut bukan berasal dari kejahatan, tetapi bukan serta merta membebaskan, terutama dalam hal tindak pidana korupsi.⁴⁵

Ketentuan Khusus mengenai pembuktian dalam perkara Korupsi terdapat dalam:

- Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b;
- Pasal 37;
- Pasal 37A;
- Pasal 38B;

Apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas di cermati, maka dapat di simpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan

⁴⁵Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 219.

antara 3 sistem. *Pertama* **system terbalik**, *kedua* **system biasa** (seperti KUHAP, kewajiban pada JPU dengan prinsip: negative berdasarkan UU yang terbatas), dan *ketiga* **semi terbalik** atau bisa juga disebut sistem **berimbang terbalik**.

System terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima *gratifikasi* (pasal 12B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Jadi. System terbalik ini adalah ke balikan dari atas *presumption of innocence*.

System terbalik hanya berlaku pada: *pertama*, tindak pidana korupsi suap menerima ratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), dan *kedua*, terhadap harta benda yang belum di dakwakan tetapi di duga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

System semi terbalik atau berimbang terbalik maksudnya beban pembuktian di letakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa menuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

System biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. System ini di gunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang di letakkan pada syarat nilai Rp 10 juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 juta pada korupsi suap menerima *gratifikasi*,

maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana .korupsi suap menerima *gratifikasi* ini dapat di sebut juga dengan system pembebanan pembuktian *berimbang bersyarat*. Di sebut berimbang, karena beban pembuktian itu di berikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Di sebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal berimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah di letakkan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima *gratifikasi* yang di peroleh pegawai negeri si pembuat. Apabila lebih atau kurang dari nilai Rp 10 juta.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dicantumkan pasal yang memberlakukan asas pembuktian terbalik di pengadilan, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan (Pasal 77) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup (Pasal 78), kalau terdakwa tidak bisa membuktikan maka harta kekayaannya dirampas dan dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang.⁴⁷

Berkaitan dengan pembuktian terbalik, penting dipahami bahwa selama ini Indonesia mengikuti sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief wettelijk overtuiging*) seperti yang tercantum pada pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2008), h 112-113

⁴⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, h. 224.

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berkaitan dengan adanya keberatan pihak yang menyadarkan alasannya pada masalah sistem pembuktian yang dianut Indonesia, seharusnya hal ini sudah tidak muncul karena pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan asas *lex specialist derogate legi generallie*, yang dengan sendirinya menyimpang dari KUHAP.⁴⁸

Jadi pada dasarnya, Pembalikan Beban Pembuktian adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi melainkan kepada diri terdakwa, dan hal ini berlaku hanya pada perkara tertentu saja, yaitu korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

C. Tinjauan Teori tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat di maklumi mengingat dampak negatif yang di timbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁹

⁴⁸Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, h. 226.

⁴⁹ Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.1.

Kasusu-kasus tindak pidana korupsi sulit di ungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering di sebut *While Collar Crime* atau kejahatan kerah putih.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi atau jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum Nasional dan Internasional (2006:4), menuliskan pengertian korupsi sebagai berikut: Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berawal dari bahasa latin corruption atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu Corruption, Corrupt. Prancis yaitu corruption, dan Belanda yaitu Corruptie, Korruptie. Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.⁵⁰ Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari Baharuddin M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁵¹ Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 menyatakan

⁵⁰Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2006), h 4.

⁵¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 5.

bahwa: (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁵²

Secara sepintas, memang diterapkannya Pembalikan Beban Pembuktian ini seakan-akan “melabrak” pakem umum yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Apalagi bila yang menilai itu adalah seorang yang berpandangan positivistis, bisa dipastikan pertentangan tersebut seolah menjadi jurang yang menganga. Padahal dalam konsep positivistik sebagaimana yang diajarkan oleh Hans Kelsen, bahwa dalam berhukum tidak boleh adanya kontradiksi antara satu asas dengan asas lain, atau satu asas dengan kaidah, serta antara kaidah dengan kaidah lainnya. Namun disisi lain, dukungan dari berbagai kalangan juga menjadi data atas harapan besar terhadap ide baru yang progresif seperti metode Pembalikan Beban Pembuktian. Urgensi penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi sangatlah tepat, berbagai pertentangan dengan asas, peraturan, doktrin dan lain sebagainya tidaklah menjadi penghambat pemberlakuan Pembalikan Beban Pembuktian. Pertentangan yang hanya disandarkan atas

⁵² *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), h 53-54.

pemikiran *positivis law* janganlah menjadi penghambat pemberlakuan Pembalikan Beban Pembuktian. Pemikiran harus dirubah dengan melihat kebutuhan bangsa saat ini, bahwa Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang *revolusioner progresif*, dan memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.

a. Kelebihan dari *Reversal Burden of Proof*

Secara konseptual, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dengan baik dapat membawa perubahan dalam sistem hukum nasional. Termasuk perubahan paradigma bagi para penegak hukum kita yang cenderung berfikir *normative-dogmatik* dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum. Hal ini penting guna membangun sistem hukum nasional yang lebih utuh, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum. Selain itu, penggunaan metode pembuktian terbalik dalam persidangan dipengadilan memberikan sedikit kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian. Terutama dalam perkara tindak pidana korupsi dimana untuk membuktikan unsur asal usul kekayaan terdakwa, cukup terdakwa sendiri yang harus membuktikannya.

Khusus perkara Tindak pidana Korupsi, pembalikan beban pembuktian sangat dibutuhkan sebab perkara ini tergolong rumit. Apalagi bentuknya sebagai kejahatan berlanjut (*follow up crime*), yang bersumber dari kejahatan asal yang disebut *predicate offense* atau *core crime*. Sehingga proses pembuktiannya pun tergolong rumit.

Penggunaan metode pembalikan beban pembuktian juga menguntungkan bagi jaksa dalam hal mengembalikan uang negara apabila uang yang dicuci terdakwa dari hasil korupsi. Sebab, dalam pembuktian, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang yang disangka akan dicuci, maka uang/harta terdakwa dapat disita untuk diserahkan kepada negara.

b. Kelemahan *Reversal Burden Of Proof*

Pertama: bahwa dalam metode pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya menjamin bahwa seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan upaya korupsi dapat membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan. Bila ini yang terjadi, boleh jadi hakim dapat dengan leluasa menghukum terdakwa bersalah karena persoalan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya.

Kedua: bahwa penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi jika tidak dilakukan dengan tepat dapat berakibat terhadap kurangnya implementasi hukum dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pembalikan beban pembuktian bisa saja mengabaikan hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk dilindungi nama baiknya.

Ketiga: dalam praktek sehari-hari, metode pembalikan beban pembuktian di Indonesia masih tergolong baru. Apalagi belum banyak perkara yang diputus di pengadilan yang menggunakan metode pembuktian terbalik terutama perkara-perkara pencucian uang. Hal ini tentunya menyulitkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) dalam mengimplementasikan aturan

mengenai penggunaan pembalikan beban pembuktian terutama untuk perkara tindak pidana pencucian uang.

Keempat: belum adanya ketentuan hukum terutama hukum acara yang mengatur secara khusus tentang penggunaan pembalikan beban pembuktian yang dapat dijadikan acuan para penegak hukum sehingga metode ini sukar untuk di implementasikan.

Kelima: secara teoritis, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian memberi kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam menuduh seseorang meskipun belum tentu orang tersebut melakukan hal apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam menuduh seseorang. Sehingga, pelanggaran terhadap kepentingan hukum setiap orang yang dituduh sangat mungkin terjadi.

D. Tinjauan Teori Tentang Hukum Pidana Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang sangat relevan dalam setiap zamannya.⁵³

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jināyah. Fiqh jināyah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci

⁵³ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Media, 2004), h. 6.

dari Alquran dan Hadis.¹ Tindak kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.³ Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan jarimah atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nass yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumannya.⁵⁴ Walaupun demikian jelasnya ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh syara berupa hadd dan ta'zir akan tetapi masih banyak orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perkembangan tindak kriminal di era sekarang tidak hanya seputar kasus pencurian, perampokan, pembunuhan. Tapi masih ada tindak kejahatan yang memiliki dampak pada sistem dan bagi kehidupan masyarakat yaitu korupsi. Jika pencurian dan pembunuhan hanya orang perorang yang dirugikan tapi korupsi bisa menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat bernegara.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang wajar dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 14.

koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.⁵⁵ Hukum pidana Islam terbagi dalam beberapa bagian. Ada berdasarkan berat ringannya hukuman. Dalam jenis ini, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan. Ada pula yang berdasarkan niat pelaku, yakni tindak pidana disengaja (*doleus delicten*) dan tidak disengaja (*culpose delicten*). Selain itu ada pula berdasarkan waktu terungkapnya, cara melakukannya, serta berdasarkan karakter khusus.

Sebagian kalangan menuding bahwa hukum pidana Islam oleh sebagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hukum pidana Islam yang memberlakukan rajam (melempar orang yang berzina hingga wafat) serta potong tangan bagi pencuri dan koruptor sangat kejam dan melanggar hak azasi manusia (HAM).

KH Anwar Hidayat, hakim pada sebuah Pengadilan Agama di Jakarta, sempat menegaskan, hukum Islam sangat elastis dan tidak kaku. Justru dijatuhkannya sanksi berupa potong tangan bagi yang mencuri, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman, rasa tenang dan memberi efek pencegahan, sehingga orang akan takut untuk mencuri.

Macam-macam hukuman dalam hukum pidana islam antara lain:

1. Penggolongan ini ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

⁵⁵ Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi “*Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1

Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), hukuman tambahan dan hukuman pelengkap

2. Penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman: Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali) dan Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendahnya, dimana hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
3. Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu: Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dimana hakim harus melaksakannya tanpa dikurangi atau di tambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan dan Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar dapat disesuaikan dengan keadaan pembuat dari perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan.
4. Penggolongan ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu: hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta
5. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu: Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Hukuman qishash dan diyat, yaitu

yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas diyat. Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah ta'zir.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga dalam hal ini dapat diketahui terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yakni cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu secara umum data yang diperoleh dalam penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan agar tidak terjadi.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan (field kualitatif research). Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan. Penelitian ini digunakan untuk mengungkap secara mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi melalui informan lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan dibantu dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan ini mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoretis yang menyangkut undang-undang dasar yang berkenaan dengan

permasalahan mengenai efektifitas reversal burden of proof. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan bantuan pertanyaan dilapangan dicoba untuk mencari jawaban melalui informan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis yaitu :Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa informan yang akan peneliti wawancara ialah, Jaksa Penuntut Umum sebanyak 3, Hakim 2 dan 2 Penasihat Hukum. Maka jumlah yang akan peneliti wawancarai sebanyak 5 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data bersifat normatif sekaligus sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari keseluruhan bahan kepustakaan, termasuk didalamnya perundang-undangan. Literatur-literatur ilmiah jurnal dan artikel-artikel yang dibuat dalam berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk digunakan sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dengan teknik observasi dapat mendapatkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain-lain. Selain itu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode.

a. Peneliti

- b. Pedoman wawancara
- c. Alat perekam/Handphone/Kamera
- d. Alat Tulis
- e. Informan

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1) Klarifikasi data (memilah-milih data)

Klarifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, *Classificatie*, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis *Classification*. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah diterapkan.

2) Reduksi data (Mengurai data)

Dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) sebagaimana diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3) Editing data (mengedit data yang salah)

Adalah disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapat diolah dengan baik.

b. Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Makassar selain memiliki tugas pokok yang telah disebutkan di atas, juga memiliki visi dan misi.

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparat.

B. Mekanisme Penerapan Reversal Burden of Proof Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal.⁵⁶

Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagai mana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan?, Apakah terbukti terdakwa bersalah?, Tindak pidana apakah yang telah dilakukan?, dan Hukuman apakah yang akan dijatuhkan?⁵⁷

⁵⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 249

⁵⁷Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 15

Jika dilihat, aspek asas hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana yang telah terjadi pembuktiannya, yaitu ketika penyelidik berupaya untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh penerangan suatu tindakan pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya, sehingga berawal dari pembuktian penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (Vonis) oleh hakim didepan persidangan secara kongkret baik pada pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*Matriel Waarheid*) dari peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁵⁸

Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana haruslah berpedoman pada hal-hal yang *limitative*, yaitu ditentukan secara yuridis. Bila hal tersebut menyimpang, maka ada mekanisme control yang juga ditentukan oleh perundang-undangan secara ketat. Hal demikian dikarenakan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana memuat, ketentuan dari ketertarikan pihak-pihak pada tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang untuk membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum.

⁵⁸Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, h. 20

Hal ini mengisyaratkan bahwa, tidak dibenarkan bila terdakwa melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak diperkenankan pula untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan undang-undang.

Secara limitative, setidaknya kekuatan pembuktian melekat pada setiap alat bukti dipergunakan dan dinilai dengan dilakukannya pembatasan yang dibenarkan oleh undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang dijatuhkan, hakim dapat terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan dan ini menunjukkan bahwa, hakim harus senantiasa berpedoman pada pembuktian dan menghindari dari pikiran subjektif. KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana yakni penuntut umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, terdakwa dan penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sanggahan, bantahan, atau eksepsi harus berdasarkan hukum dengan saksi yang meringankan (*Ad charge*) ataupun alibi yang sesuai dengan fakta yuridis.

Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian berarti sebuah penegasan, yang berarti ketentuan tindak pidana lain harus dijatuhkan kepada terdakwa. Sehingga arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti, dan hukumannya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan. Oleh

karenanya, pembuktian tersebut tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian, yakni sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*Bewijsbronden*), alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*Bewijsmiddelen*), penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan (*Bewijsvoering*), kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*Bewijskrach*), atau beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan (*Bewijslaast*).

Dalam perjalanannya, pembuktian mengalami perkembangan yaitu diperkenalkannya pembuktian terbalik. Dalam praktek, dapat diklasifikasikan menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya, beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. Lazimnya, Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasehat hukumnya akan membuktikan kesalahan-kesalahan Penuntut Umum, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini di dalam praktek peradilan di Indonesia dan juga Amerika Serikat.

Secara historis, asas beban pembuktian terbalik dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *case law* atau kasus tertentu khususnya tindak pidana *gratification*, pemberian suap.

Di Indonesia, asas beban pembuktian terbalik ini pertama kali diperkenalkan secara hukum positif ke dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, kemudian juga pada tahun 2010 asas beban pembuktian terbalik ini diperkenalkan dalam tindak pidana pencucian uang. sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

1. Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, dimana Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHP.

2. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut Umum saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.

Pada tahun 2001 Andi Hamzah, pernah menyatakan dalam seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Trisakti bahwa istilah pembuktian terbalik yang dikenal di Indonesia adalah kurang tepat, karena dalam bahasa belandanya dikenal dengan “*omkering van het bewijslast*” atau dalam bahasa inggris “*Reversal*

burden of proof”, yang apabila diterjemahkan akan menjadi “pembalikan beban pembuktian”⁵⁹. Yang artinya terdakwa yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikan maka dia dianggap bersalah. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari asas umum hukum pidana yaitu *presumption of innocence*.

Sejak tahun 1970-an pemikiran tentangembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Reversal burden of proof*) sudah dimasukkan yakni saat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang saat itu terjadi beberapa perdebatan, dengan mengutip pendapatnya Prof. Oemar Seno Adji bahwa prinsipembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Reversal burden of proof*) potensial bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa.

Pembalikan beban pembuktian memang merupakan suatu sistem pembuktian yang tidak dikenal dalam KUHAP. Untuk di Indonesia sendiri, sistemembalikan beban pembuktiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Khusus mengenai pembuktian dalam perkara Korupsi terdapat dalam:

⁵⁹Andi Hamzah, *Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian: Debat Publik Pembuktian Terbalik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 1

- Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b;
- Pasal 37;
- Pasal 37A;
- Pasal 38B;

Apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas di cermati, maka dapat di simpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem. *Pertama* **system terbalik**, *kedua* **system biasa** (sepeerti KUHAP, kewajiban pada JPU dengan prinsip: negative berdasarkan UU yang terbatas), dan *ketiga* **semi terbalik** atau bisa juga di sebut sistm **berimbang terbalik**.

System terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima *gratifikasi* (pasal 12B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa di anggap bersalah. Jadi. System terbalik ini adalah ke balikan dari atas *presumption of innocence*.

System terbalik hanya berlaku pada: *pertama*, tindak pidana korupsi suap menerima ratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), dan *kedua*, terhadap harta benda yang belum di dakwakan tetapi di duga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

System semi terbalik atau berimbang terbalik maksudnya beban pembuktian di letakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa menuntut umum

secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

System biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. System ini di gunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang di letakkan pada syarat nilai Rp 10 juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 juta pada korupsi suap menerima *gratifikasi*, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi* ini dapat di sebut juga dengan system pembebanan pembuktian *berimbang bersyarat*. Di sebut berimbang, karena beban pembuktian itu di berikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Di sebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal berimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah di letakkan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima *gratifikasi* yang di peroleh pegawai negeri si pembuat. Apabila lebih atau kurang dari nilai Rp 10 juta.⁶⁰

System pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari Negara anglo saxon. Seperti inggris, singapura dan malaaysia. System pembebanan pembuktian

⁶⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2008), h 112-113

terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap.

Bagaimana gambaran system beban pembuktian terbalik dalam hokum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca norma pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya adalah

- 3) Pasal 37 merupakan dasar hukum system pembebanan pembuktian terbalik
- 4) Pasal 12B ayat 1 huruf a dan pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya menggunakan system terbalik.⁶¹

Berkaitan dengan adanya keberatan beberapa pihak yang menyandarkan alasannya pada masalah sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, secara umum mereka menganggap bahwa pembalikan beban pembuktian ini telah mengesampingkan asas *presumption of innocence* yang mana hal tersebut dapat mengambil hak-hak dari seorang terdakwa.

Dalam wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, beliau mengatakan bahwa seharusnya hal ini sudah tidak dipermasalahkan lagi karena pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan asas *lex specialist derogat legi generallie*, yang dengan sendirinya menyimpang dari KUHAP.⁶²

⁶¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*(Bandung:Penerbit P.T Alumni,2008), h 113-114

⁶²Doddi Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 5 April 2019

Presumption of innocence diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disisi lain dikenal juga asas *presumption of guilt* yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. Artinya, seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.

Khusus mengenai asas praduga bersalah dan praduga tak bersalah ini perlu dipahami bahwa kedua asas tersebut tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lain. Bahkan Beliau dengan tegas mengatakan, Hal ini tidak berarti kita dapat membenturkan asas praduga bersalah dengan asas praduga tidak bersalah. Karena jika kita memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam *crime control model* sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam *due process model*. Hal ini juga bisa di ibaratkan sebagai kedua bintang kutub dari proses kriminal, dan asas praduga tidak bersalah bukanlah lawannya. Asas tersebut tidak relevan dengan asas praduga bersalah karena kedua konsep tersebut berbeda, tetapi tidak bertentangan.⁶³

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Sementara itu asas praduga bersalah bersifat

⁶³Doddi Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 5 April 2019

deskriptif faktual. Artinya, berdasarkan fakta-fakta yang ada, si tersangka pada akhirnya akan dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pengadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendatipun secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, secara legal formal KUHAP dan kita juga menganut asas praduga bersalah. Hal ini paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 17 KUHAP yang menyebutkan “*perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasarkan deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Berkaitan dengan pembuktian asas *Presumption of innocence*, hal tersebut merujuk pada beban pembuktian. Karena seseorang dianggap tidak bersalah, maka beban pembuktian tersebut ada pada Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa bahwa seseorang telah bersalah melakukan kejahatan. Sementara itu dalam pembuktian terbalik yang bersifat absolut sebagaimana telah diuraikan diatas, asas yang digunakan adalah asas praduga bersalah dan bukan asas praduga tidak bersalah.⁶⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas praduga tidak bersalah tidak efektif dalam menjalankan sistem pembalikan beban pembuktian, karena asas yang

⁶⁴Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012) h.33-

berlaku pada sistem pembalikan beban pembuktian adalah asas praduga bersalah atau *presumption of guilty*.

C. Kelebihan dan Kekurangan Reversal Burden Of Proof yang diterapkan pada perkara korupsi.

Berbicara mengenai hukum tidak hanya sebatas UU saja karena UU hanya merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, di luar paham positivisme hukum, terdapat paham hukum lain berperan penting sebagai sumber hukum formal dalam praktik pembangunan hukum, saling melengkapi satu dengan lainnya. Menurut pandangan penganut hukum alam (natural law), isi hukum adalah moral. Hukum tidak semata-mata merupakan suatu peraturan tentang tindakan hukum, tetapi juga berisi nilai-nilai. Hukum adalah indikasi mengenai perbuatan apa saja yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Di sisi lain, bagi penganut sociological jurisprudence, hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan masyarakat. Jadi, yang didahulukan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan jadi hidup.

Dalam kaitan itu, penerapan pembuktian terbalik dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak dapat serta merta di justifikasi sebagai bentuk intervensi hukum terhadap hak dasar individu atau bentuk pelanggaran terhadap International Covenant on Civil and Political Rights, apalagi dikaitkan dengan prinsip *presumption of innocence*. Tujuan penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan UU yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggungjawaban dari aparaturnya atas kewenangan yang ada

padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta dilaksanakan sesuai ketentuan UU.

Untuk itu, hak dasar seseorang yang dijamin pelaksanaannya dalam asas non self incrimination tak dapat ditafsirkan secara sepihak, tetapi juga harus dilihat dari sudut lebih luas. Dalam konteks tertentu atau secara kasuistik dilihat kewenangan yang melekat pada individu bersangkutan, hak dan kewajibannya. Sebagai pelaksana kepentingan bangsa dan negara, ia berkewajiban menjamin kewenangan yang ada padanya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan asas non self incrimination dalam pengertian terbatas juga mengandung hak dan kewajiban hukum di dalamnya, sesuai fungsi hukum yang memberikan pembatasan.

Tugas penyidik dan penuntut umum adalah untuk membuktikan harta dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkembangannya penyidik dan penuntut umum mengalami kesulitan untuk membuktikan hal tersebut. Sehingga merupakan hal yang penting untuk menerapkan pembuktian terbalik, supaya kesulitan penyidik dan penuntut umum dapat teratasi. Selain itu, penuntut umum tidak perlu lagi mencari bukti tentang harta kekayaan karena dibebankan kepada terdakwa. Dalam hukum perdata pengakuan kepemilikan yang sah harus dibuktikan oleh pemilik.

Dalam penerapannya arah pembuktian lebih bersifat keperdata tentang pengakuan kepemilikan hak yang sah daripada tindak korupsinya. Selain itu, harus

ada hubungan sebab atau asal usul kejahatan karena tidak menutup kemungkinan tidak ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Bisa saja terdapat perbuatan korupsi tetapi yang dibuktikan itu hasil dari tindak pidana narkoba. Dimensi beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka proceeding (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (presumption guilt) dalam hal presumption of corruption, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka proceeding kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang.

Dari hasil wawancara pada tanggal 1 April 2019 dengan bapak Doddi Hendrasakti, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar), Doddi Hendrasakti, S.H.,M.H mengungkapkan bahwa kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan selama penuntut umum dapat membuktikan maka harta yang dimilikinya dapat disita untuk negara.

Selain kelebihan tersebut Doddi Hendrasakti, S.H.,M.H juga mengungkapkan kekurangan dari pembuktian terbalik tersebut terlalu banyak dipolitisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Korupsi. Hal ini bertujuan agar terdakwa benar-benar dituntut sebagaimana mestinya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Doddi Hendrasakti, S.H.,M.H, dalam kesempatan wawancara lain pada tanggal 1 April 2019 dengan Suherman Bahran, S.H. (Advokat dan Konsultan Hukum), Suherman Bahran, S.H. mengungkapkan bahwa pembuktian terbalik tersebut tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Selain itu, Suherman Bahran, S.H. mengungkapkan bahwa substansi dari pembuktian terbalik itu tidak diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah aturan yang tidak diatur secara tegas dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

D. Efektifitas Reversal burden of proof dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang sangat relevan dalam setiap zamannya.⁶⁵

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jināyah. Fiqh jināyah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci

⁶⁵ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Media, 2004), h. 6.

dari Alquran dan Hadis.¹ Tindak kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.³ Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal dengan sebutan jarimah atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nass yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumannya.⁶⁶ Walaupun demikian jelasnya ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh syara berupa hadd dan ta'zir akan tetapi masih banyak orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perkembangan tindak kriminal di era sekarang tidak hanya seputar kasus pencurian, perampokan, pembunuhan. Tapi masih ada tindak kejahatan yang memiliki dampak pada sistem dan bagi kehidupan masyarakat yaitu korupsi. Jika pencurian dan pembunuhan hanya orang perorang yang dirugikan tapi korupsi bisa menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat bernegara.

KH Anwar Hidayat, hakim pada sebuah Pengadilan Agama di Jakarta, sempat menegaskan hukum Islam sangat elastis dan tidak kaku. Justru dijatuhkannya sanksi berupa potong tangan bagi yang mencuri, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman, rasa tenang dan memberi efek pencegahan, sehingga

⁶⁶ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 14.

orang akan takut untuk mencuri. ”Penegasan Alquran yang mengatakan orang yang mencuri harus dipotong tangannya, itu menunjukkan untuk memberi ketenangan dan keamanan bagi umat. Itu pun tentu tidak asal menjatuhkan sanksi, tapi harus melalui proses yang diajukan ke pengadilan dengan berbagai bukti serta menghadirkan dua orang saksi laki-laki,” paparnya Kiai Anwar.

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, KH Ahmad Mukri Ajie, menuturkan, Rasulullah SAW dalam proses peradilan pidana sangat sedikit sekali mengeksekusi hukum potong tangan. Termasuk hukum rajam bagi pezina. Menurut Kiai Mukri, ketika datang seseorang mengaku berbuat zina, Rasulullah tak serta merta langsung merajam orang tersebut, tapi terlebih dulu diadili dan diproses cukup lama. Hal itu dicontohkan saat Maiz bin Malik menemui Rasulullah SAW seraya mengaku kalau dirinya telah berbuat zina. Kasus zina yang kelihatan hukumannya menyeramkan ternyata dalam dataran eksekusi di lapangan tidaklah mudah. ”Begitu sangat hati-hatinya, sehingga nanti ada pihak penuduh di sana, orang yang menyatakan si A berzina tapi dia tidak bisa menghadirkan empat saksi mata bukan lewat video, bukan lewat foto, nggak bisa itu,” papar Kiai Mukri. Keempat saksi mata itu disumpah.

A. Pengertain Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah* mengartikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu

peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan

Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu.

B. Jenis-jenis Alat Bukti

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana. Pertama, menurut jumhur ulama', untuk pembuktian jarimah qishash dan diyat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian: pengakuan, persaksian, dan al-qosamah. Kedua, menurut sebagian fuqoha seperti Ibn Al-Qayyim dari mazab Hambali, untuk pembuktian qishash dan diyat digunakan 4 cara pembuktian: pengakuan, persaksian, al-qasamah, dan qarinah. Ketiga alat bukti tersebut qasamah (pengakuan, persaksian, dan qarinah) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam jarimah-jarimah hudud. Perbedaan pendapat antara para ulama' hanya terdapat dalam alat bukti qarinah, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya ada dua, yaitu pengakuan dan persaksian. Qasamah sendiri juga termasuk alat bukti yang di perselisihkan, walaupun ulama-ulama dan kalangan mazab empat telah menyepakati.

1) Pengakuan

Pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun sumber dari Al-Qur'an tercantum dalam: surat An-Nisa' ayat 35.

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu ..."

Dari ayat diatas, bahwa penyaksian seorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

Pengakuan (*iqrar*) adalah dasar yang kuat, karena itu hanya mengenai akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain. Pengakuan dapat berupa ucapan, atau isyarat bagi orang yang bisu sulit bicara, untuk kasus-kasus selain zina, yang apabila pembuktian dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan subhat (perserupaan). Sebab isyarat dapat menimbulkan paham yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan subhat dalam menjatuhkan putusan.

Apabila orang yang melakukan pengakuan menarik kembali pengakuannya maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut apabila tidak pidana yang tadinya dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah yang gugur karena adanya subhat. Adapun tidak pidana yang berkaitan dengan hak manusia atau hak Allah yang tidak gugur karena subhat, seperti zakat dan

kifarat maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut tidak diterima. Apabila seorang mengaku berbuat zina tetapi ia menarik pengakuannya maka ia tidak dituntut karena pengakuannya itu. Akan tetapi ia mengaku membunuh orang atau melukainya kemudian ia mencabut pengakuannya, maka ia tetap dituntut, karena tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan hak manusia yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan kerelaan korbannya.

2) Persaksian

Bayyinah dalam istilah fuqaha', *syadanah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al-Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Syahadah adalah mengemukakan, syahada (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblih dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz-lafadz syahadat di depan pengadilan. Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Memberi kesaksian asal hukumnya fardlu kifayah, artinya jika 2 orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.

Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pelukaan (penganiayaan), para fuqaha membedakan antara jarimah yang hukumannya badaniah seperti qishash, dera dan lain-lain dengan jarimah yang hukumannya maliah, seperti diat atau ganti rugi.

a) Jarimah yang hukumannya badaniah

Jarimah yang hukumannya badaniah ada kalanya qishash dan ada kalanya ta'zir. Untuk jarimah yang hukumannya qishash, menurut jumhur fuqaha', pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban.

Untuk jarimah yang hukumannya ta'zir badaniah bersama-sama dengan qishash maka pembuktiannya sama dengan jarimah yang mewajibkan hukuman qishash. Adapun jarimah yang mewajibkan hukuman ta'zir badaniah qishash maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktiannya sama dengan jarimah yang hukumannya qishash, yaitu dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini karena hukuman badan itu merupakan hukuman yang sangat mengkhawatirkan, sehingga pembuktiannya harus dengan hati-hati, sedangkan menurut Imam Malik, untuk pembuktian jarimah qishash selain jiwa bisa dengan seorang saksi laki-laki dan sumpahnya korban, dan hukuman yang dijatuhkan disamping qishash ditambah dengan hukuman ta'zir. Menurut Imam Abu Hanifah, untuk membuktikan jarimah yang hukumannya ta'zir bisa digunakan dua saksi laki-laki yang salah satunya korban, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang

perempuan. Bahkan menurut kedua muridnya dalam kasus ini, pembuktiannya cukup dengan seorang saksi laki-laki yang adil, atau dengan persaksian penuntut (korban) ditambah dengan keengganan bersumpahnya terdakwa, atau bahkan cukup dengan pengetahuan hakim (*'ilmu qadhi*).

b) Jarimah yang hukumannya maliah

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah, seperti diat dan ganti rugi, bisa dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpahnya penuntut (korban) atau keengganan bersumpahnya terdakwa. Mereka (Malikiyah) membolehkan pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah dengan saksi dua orang wanita ditambah dengan sumpahnya penuntut, sedang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkannya. Alasan mereka (Malikiyah) adalah bahwa dua orang perempuan dapat mengantika seorang laki-laki dalam kedudukannya sebagai saksi dalam masalah harta benda. Karena itu maka dalam hukuman maliah dua orang perempuan juga bisa digunakan sebagai saksi untuk pembuktian tindak pidananya. Seding menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, untuk pembuktian tindak pidana yang hukumannya maliah dapat digunakan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa tindak pidana yang hukumannya maliah dapat dibuktikan dengan seorang saksi tanpa diperkuat dengan sumpah, apabila hakim mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Apabila hakim tidak meyakini

keterangansaksi, karena keterangannya meragukan maka hakim dapat menolaknya.

Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.

3) Qasamah

Qasamah dalam arti bahasa adalah *al-yamin* yang artinya sumpah. Menurut istilah, qasamah didefinisikan sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan. Abu Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili juga membuat definisi dengan menyatakan: Arti qasamah menurut istilah fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkan (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi:

Dari Abi Salam ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw menetapkan qasamah (sebagai alat bukti)

sebagaimana yang berlaku dizaman jahiliah. (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i).

Qasamah adalah suatu cara pembuktian dengan bersumpah yang dilakukan (diucapkan) 50 orang. Disyari'atkan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan bagaimanapun pembunuhan itu harus tetap diselesaikan, dibuktikan dan ditetapkan hukumannya. Dengan demikian, qasamah merupakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus pembunuhan, dimana tidak terdapat bukti berupa saksi atau pengakuan.

Menurut ulama Hanafiah, qasamah disyari'atkan untuk menanggulangi kelalaian warga ditemukannya korban dalam menjaga dan memelihara wilayah dari tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan, baik penduduk setempat maupun oleh pihak luar. Akibat kelalaian mereka dalam mengamankan wilayahnya, mereka dibebani kewajiban harus melakukan qasamah dan sekaligus membayar diat, karena menurut Imam Abu Hanifah, mereka baik sebagai individu atau kelompok dianggap membunuh korban, karena mereka harus bertanggung jawab.

Para ulama sepakat bahwa qasamah hanya dilakukan untuk tindakan pembunuhan, bukan yang lainnya. Hanya saja kapan digunakannya qasamah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, qasamah dilakukan apabila pelaku (pembunuh) tidak diketahui. Apabila pelakunya diketahui maka pembuktiannya tidak menggunakan qasamah, melainkan menggunakan cara-cara pembuktian biasa.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, qasamah digunakan apabila pelaku (pembunuh) diketahui ada tanda dan petunjuk yang mengarah

kepadanya. Apabila pembunuh tidak diketahui maka menurut mereka (jumhur) qasamah tidak dapat diberlakukan.

4) Qarinah

Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Dalam jarimah zina, misalnya qarinah sudah dibicarakan, baik kegunaanya maupun dasar hukumnya. Salah satu conto qarina dalam jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam jarimah syurbul khami (meminum-minuman keras), yang dapat dianggap sebagai qarinah, misalnya bau minuman dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian dirumah tersangka merupakan suatu qarinah yang menunjukkan bahwa tersangka yang mencuri barang tersebut.

Pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut: Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas menyerai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan *Reversal Burden of Poof* (pembalikan beban pembuktian) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah :

Dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 37, 37A dan 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Operasionalisasi dari kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

2. Kelebihan *Reversal Burden of Poof* Secara konseptual, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dengan baik dapat membawa perubahan dalam sistem hukum nasional. Termasuk perubahan paradigma bagi para penegak hukum kita yang cenderung berfikir normative-dogmatik dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum. Hal ini penting guna membangun sistem hukum nasional yang lebih utuh, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum. Selain itu, penggunaan metode pembuktian

terbalik dalam persidangan dipengadilan memberikan sedikit kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian. Terutama dalam perkara tindak pidana korupsi dimana untuk membuktikan unsur asal usul kekayaan terdakwa, cukup terdakwa sendiri yang harus membuktikannya.

3. bahwa dalam metode pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya menjamin bahwa seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan upaya korupsi dapat membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan. Bila ini yang terjadi, boleh jadi hakim dapat dengan leluasa menghukum terdakwa bersalah karena persoalan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya.
4. Efektivitas dari *Reversal Burden of Proof* atau sistem pembalikan beban pembuktian, tentulah tidak efektif. Karena asas yang berlaku pada sistem pembalikan beban pembuktian adalah Asas *Presumption of Guilt* (asas praduga bersalah) yang artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Meskipun asas ini dianggap sebagian orang sebagai hal yang merugikan hak-hak terdakwa, tetapi seharusnya hal ini tidak usah dipermasalahkan lagi karena pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan asas *lex specialist derogat legi generallie*, yang dengan sendirinya menyimpang dari KUHAP. Dan pemberlakuan asas ini justru telah memperhitungkan kesulitan dalam pembuktian, namun tetap dalam koridor tidak melanggar HAM (hak asasi manusia) dan konstitusi.

B. *Implikasi Penelitian*

Pelaksanaan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya yang maksimal dalam mengurangi kejahatan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan Negara. Sangat diperlukan pengetahuan dan kerja sama yang memadai dari para aparat penegak hukum, baik itu polisi sebagai penyidik, jaksa, maupun hakim agar dapat menjerat para pelaku kejahatan.

Terkait pemaknaan dan filosofi korupsi maupun tentang pembuktian terbaliknya, Sebagian orang menganggap bahwa sistem pembalikan beban pembuktian ini masih dinilai cacat hukum, karena dinilai merugikan sebagian hak-hak dari terdakwa sehingga diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengkaji bahwa sebenarnya pemberlakuan asas ini justru telah memperhitungkan kesulitan dalam pembuktian, namun tetap dalam koridor tidak melanggar HAM (hak asasi manusia) dan konstitusi.

Diperlukan penyempurnaan dalam aturan pembalikan beban pembuktian agar aparat penegak hukum dan khususnya pemerintah dapat meminimalisir terjadinya tingkat kejahatan korupsi maupun pencucian uang yang sangat merugikan bangsa dan Negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman. *system pembalikan beban pembuktian menurut undang-undang no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang no.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Chazawi,Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*, Malang: Media Nusa Creative, 2018
- Hamzah,Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*,
- Dr. Yunus Husein, *Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia*, tanpa tahun
- Garnasih, Yenti, *penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang*, pelatihan tematik tindak pidana korupsi dan pencucian uang bagi hakim dan jaksa, Kuta bali: diselenggarakan komisi yudisial Indonesia, 2014.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979
- Marpaung.Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, Edisi II, Jakarata: Sinar Grafika, 2011
- Martiman Projohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Bandung: Mandar Maju, 2001
- Harahap.M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali.* , Sinar Grafika, 2006
- Memed Riadi. 2011. *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, Makassar: Alauddin Univercity Press, 2013

Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2010

Sudikno mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Prespektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2015



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HASRULLAH JAYA SAPUTRA Lahir di Mangkutana, 01 juli 1995 dari Pasangan Ambo Tuwo dan Hj. Berlian. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis pertama kali melangkahhkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2002 di SD 162 Limbomampongo dan Tamat sekolah pada tahun 2008. Kemudian lanjut pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalaena dan tamat pada tahun 2011. Kemudian Lanjut di SMA Negeri 1 Kalaena dan tamat Tahun 2014.

Kemudian setelah tamat penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Islam Negeri (UMPTKIN) pada tahun 2014 dengan mengambil Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum

